

JIP21-16-001

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH RAWAN KONFLIK DAN PERBATASAN**

***THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION PROGRAM OF AWARENESS TO DEFEND STATE
BY THE MINISTRY OF DEFENSE IN CONFLICT-RISKED AND BORDER AREAS***

Eddy M. T. Sianturi
Puslitbang Sumdahan Balitbang Kemhan
Jl. Jati No.1, Pondok Labu Jakarta
sianturieddymt@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pembinaan kesadaran bela negara merupakan proses yang tiada berkesudahan dalam menegakkan keberadaan dan jati diri suatu negara bangsa. Jika negara bangsa tidak mampu merespons perkembangan zaman, lambat laun ia akan kehilangan identitas nasionalnya dan pada akhirnya akan sirna. Oleh karena itu, pembinaan kesadaran bela negara merupakan long life education bagi bangsa Indonesia. Selama bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) eksis, kesadaran bela negara tetap dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program bela negara di daerah rawan konflik dan perbatasan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Bela Negara Ditjen Potan Kemhan dan mendeskripsikan kendala dan hambatan yang ditemukan di lokus penelitian sekaligus memberikan solusi dan rekomendasi untuk mewujudkan efektivitas program PKBN di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis yang dikombinasikan dengan analisis SWOT. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara mendalam kepada narasumber. Pengisian kuesioner dilakukan oleh responden yang sudah pernah mendapatkan sosialisasi PKBN oleh Ditjen Potan. Responden tersebut sebanyak 25 orang aparat, masyarakat, dan generasi muda dari 123 orang peserta kegiatan Binnis yang dilaksanakan oleh Direktorat Bela Negara Ditjen Potan Kemhan pada September 2011 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Kata kunci: PKBN, kesadaran bela negara, daerah rawan konflik, daerah perbatasan.

ABSTRACT

Fostering awareness to defend state is an everlasting process in order to maintain nation-state's existence and identity. If the nation-state is unable to respond current situation, eventually it will lose its national identity and disappear. Thereby, fostering awareness to defend state is a long life education for Indonesia as a nation. As long as the nation and the Republic of Indonesia exists, awareness to defend state will always be needed. This study aims to examine the effectiveness of the socialization program to raise awareness to defend state in conflict-risked areas and borderlands by the Directorate of State Defense Directorate General Defense Potency Ministry of Defense and to describe the obstacles and barriers that are found in the research loci, as well as to provide solutions and recommendations to increase the effectiveness of the program in the future. This study uses analytical description as its method combined with SWOT analysis. Data was collected by questionnaire and in-depth interview. Questionnaire was filled by the respondents who already had conducted socialization program by the Ministry of Defense. The respondents consist of 25 officers, citizens, and the youth from 123 participants of technical guidance carried out by the Directorate of State Defense Directorate General Defense Potency Ministry of Defense in September 2011 in Sambas Regency, West Kalimantan.

Keywords: PKBN, awareness to defend state, conflict-risked areas, borderlands.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat, Indonesia dengan tujuan dan cita-cita nasionalnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera memiliki kepentingan

untuk menerapkan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pembangunan tersebut harus mampu menjangkau seluruh pelosok tanah air dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, serta harus mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah perbatasan. Pemerintah harus menjamin

stabilitas keamanan demi lancarnya setiap program pembangunan dengan dukungan seluruh komponen bangsa. Namun, sejarah membuktikan bahwa tidak mudah untuk melakukan upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional, karena selalu ditemui banyak tantangan, ancaman, dan hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa ini, pasti tersimpan persoalan yang dapat memicu konflik, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.

Upaya Internalisasi kesadaran bela negara sebagai upaya membangun karakter bangsa bukanlah sebuah proses yang mudah dan sekali jadi, karena hasilnya tidak dapat dilihat seketika, memerlukan waktu yang lama, bahkan tanpa batas waktu. Namun, kita harus meyakini bahwa upaya ini akan mampu menumbuhkan dan membangun semangat kebangsaan setiap warga negara agar selalu bangga menjadi bangsa Indonesia dan senantiasa memiliki komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran bela negara, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemhan), telah melakukan program Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang mencakup lingkungan pendidikan (lingdik), lingkungan pemukiman (lingkim), dan lingkungan kerja (lingja) di 22 dari 33 provinsi yang ada, sampai dengan tahun 2013.

Upaya internalisasi nilai-nilai bela negara menjadi lebih strategis untuk digalakkan di daerah rawan konflik dan daerah perbatasan yang memiliki persoalan lebih kompleks. Konflik sering kali dipicu oleh hal yang sangat sepele, tetapi karena tidak dikelola dengan bijak, konflik tersebut dapat berkembang menjadi konflik komunal yang cenderung lebih sulit diatasi dibanding dengan konflik vertikal. Dengan kesadaran bela negara yang tinggi, diyakini masyarakat semakin dewasa dalam menyikapi setiap konflik yang terjadi, sehingga tidak menjadi konflik yang destruktif. Di daerah perbatasan yang notabene tertinggal secara sosial ekonomi, keterbatasan akses dan infrastruktur perlu mendapatkan perhatian khusus agar masyarakat setempat juga merasakan perkembangan/kemajuan pembangunan dan merasa menjadi bagian dari warga Indonesia. Masyarakat yang terlibat konflik berkepanjangan dan berulang,

serta masyarakat daerah perbatasan sangat rawan untuk terpengaruh pihak lain, apalagi pihak asing.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang sudah dilakukan, perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif melalui penelitian dan pengembangan tentang efektivitas program PKBN Kemhan di daerah rawan konflik dan perbatasan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi nilai-nilai luhur bangsa dan kesadaran bela negara warga negara menunjukkan kecenderungan melemah. Hal ini didasarkan pada beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat yang menimbulkan konflik-konflik, khususnya di daerah rawan konflik dan perbatasan.
2. Pemahaman nilai-nilai seperti yang tertuang dalam materi sosialisasi/bimbingan teknis (Bimnis) PKBN yang telah diberikan belum terlihat nyata di tataran implementasi dalam kehidupan masyarakat di daerah rawan konflik dan perbatasan.
3. Masih ditemukan banyak kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program PKBN, khususnya di tataran implementasi.

Dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas kegiatan sosialisasi/ Bimnis PKBN di daerah rawan konflik dan perbatasan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Bela Negara Ditjen Potan Kemhan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan hambatan bagi efektivitas program PKBN di daerah rawan konflik dan perbatasan?
3. Strategi dan upaya apa yang dapat dilakukan agar program PKBN di daerah rawan konflik dan perbatasan dapat berjalan efektif di tataran pemahaman dan implementasi?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kesadaran Bela Negara

Kesadaran bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan seluruh komponen bangsa yang teratur, menyeluruh dan terpadu, serta berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kesadaran Bela Negara merupakan proses, kegiatan yang harus terus-menerus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa. Kesadaran bela negara harus timbul dari kesadaran pribadi dan kesadaran bersama dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Kaitan Efektivitas Program PKBN dan Pembangunan Karakter Bangsa

Implementasi nilai-nilai dasar bela negara merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai-nilai ini menggambarkan jati diri dan karakter asli manusia Indonesia, digali dari nilai-nilai luhur yang berkembang dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat berbagai suku bangsa sejak dahulu.

Dalam rangka membangun sikap moral dan kesadaran profesional secara umum, diperlukan Pendidikan Kesadaran Bela Negara. Mengingat PKBN mengedepankan pendidikan keutamaan warga negara, maka pendidikan ini dapat digolongkan ke dalam pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). PKBN merupakan pembentuk sikap moral dan watak bangsa. Dari aspek pendidikan politik, PKBN harus mampu merestrukturkan keluarannya dalam sikap dan perilaku patriotik dalam partisipasi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat demi kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan bangsa dan negara.

Pembangunan karakter berkaitan dengan nilai. Nilai baru dapat berfungsi jika tersusun dalam norma, dan dipraktikkan dalam perilaku. Setiap kali melaksanakan suatu kebijakan atau keputusan,

negara dan warga negara harus berpedoman pada moral dan etika, sehingga sikap dan perilaku yang ditampilkan mencerminkan karakter pelakunya. Apakah pelaku tersebut sesungguhnya membela negara atau justru melemahkan, bahkan menghancurkan negara? Kekuatan jiwa atau roh bela negara itu pada ujungnya berada pada sikap moral dan perilaku dalam wujud tindakan. Agar tindakan lebih terarah atau berkembang menjadi lebih baik dalam arti rasional, praktis, efektif, dan efisien, diperlukan PKBN. Di sinilah peranan PKBN melalui proses pewujudan nilai, norma, moral, etika, dan karakter warga negara. Dalam membangun komponen pertahanan negara, PKBN merupakan unsur dasar yang penting. Kesadaran bela negara, bila ditinjau dari elemen kekuatan suatu bangsa, tergolong dalam kekuatan moral (*psychological defense*).

Dari berbagai uraian di atas, jelaslah bahwa kesadaran bela negara merupakan prasyarat bagi terbangunnya sistem pertahanan negara. PKBN adalah bagian dari persiapan dini yang akan mendasari totalitas penyelenggaraan pertahanan negara yang harus dimulai sejak pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan perguruan tinggi dan dilakukan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai dasar bela negara: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan untuk berkorban demi bangsa dan negara Indonesia, serta memiliki kemampuan awal bela negara baik psikis maupun fisik.

Yudhohusodo (1996: 12-13) menegaskan bahwa wawasan kebangsaan meliputi tiga unsur, yakni rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu kesadaran untuk bersatu sebagai sebuah bangsa yang lahir secara alamiah karena sejarah, karena aspirasi perjuangan masa lampau, karena kepentingan, karena rasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi segala tantangan, serta karena kesamaan pandangan, harapan, dan tujuan dalam merumuskan cita-cita bangsa untuk waktu yang akan datang. Dengan kata lain, rasa kebangsaan merupakan perekat yang mempersatukan dan memberikan dasar kepada jati diri kita sebagai bangsa.

Paham kebangsaan adalah aktualisasi

dari rasa kebangsaan yang berupa gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang bersifat nasional, di mana suatu bangsa memiliki satu cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dengan tujuan nasional yang jelas dan rasional. Paham kebangsaan itu dinamis, berkembang, dan dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang sangat kompleks sifatnya. Adapun semangat kebangsaan adalah perpaduan atau sinergi antara rasa kebangsaan dan paham kebangsaan, berupa kerelaan berkorban demi kepentingan negara dan tanah air.

Kesadaran bela negara pada semua tataran tersebut merupakan modal sosial bagi bangsa dalam menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter.

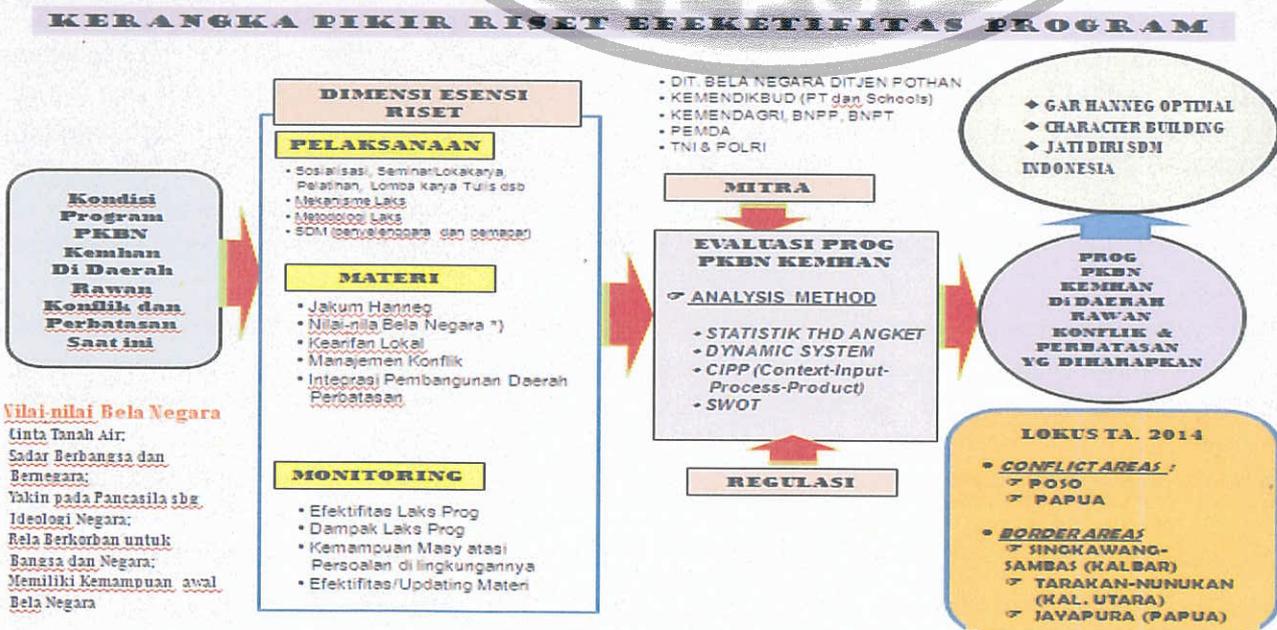
Kerangka Pemikiran

Penelitian dan pengembangan mengenai efektivitas pelaksanaan program PKBN Kemhan di daerah rawan konflik dan perbatasan penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui apakah program tersebut selama ini telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Efektivitas dan efisiensi program tersebut dapat diukur dari dimensi atau indikator pelaksanaan, materi, dan monitoring yang diperoleh melalui jawaban responden terhadap variabel penelitian, observasi, dan wawancara.

Dimensi pelaksanaan program meliputi perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan. Dimensi materi terdiri atas materi yang disiapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan PKBN tersebut, kemampuan dan kesiapan pemapar/pengajar, serta kemampuan peserta dalam memahami materi kegiatan. Adapun dimensi monitoring adalah dimensi yang kompleks, yang merupakan gabungan kedua dimensi sebelumnya.

Pada pelaksanaan riset pada tahun 2015, tim berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari narasumber/informan tentang kondisi nyata kesadaran bela negara di lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pemukiman/masyarakat. Tim juga berusaha mengetahui hambatan-hambatan serta kendala proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari di lokus penelitian. Diharapkan ke depan hasil dari riset ini dapat dijadikan model bagi pengukuran efektivitas sebuah program atau kegiatan dan evaluasi berbagai kelemahan atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Secara ringkas, kerangka pemikiran litbang efektivitas program PKBN Kemhan di daerah rawan konflik dan perbatasan untuk tahun anggaran 2015 ini tergambar dalam skema pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema kerangka pemikiran penelitian.

Deskripsi Objek Penelitian/Unit Analisis

Objek penelitian atau unit analisis penelitian ini adalah para narasumber yang sudah pernah memperoleh sosialisasi/Bimnis PKBN Kemhan sejak tahun 2007 s.d. 2013 di empat lokus: Jayapura, Sambas, Tarakan dan Nunukan, serta Palu dan Poso. Mereka terdiri atas aparat Korem/Kodim, Polri, dan Pemda, serta Pramuka dan para pemuda. Selain karena alasan keterbatasan dana riset, pemilihan keempat lokus tersebut juga didasarkan pada hasil koordinasi dengan Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan dan pada data kegiatan Bimnis Bela Negara yang pernah dilakukan Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan pada September 2011 di Aula Kantor Bupati Sambas, Kalimantan Barat. Keempat lokus merupakan daerah yang menjadi sasaran sosialisasi/Bimnis dan kegiatan program PKBN oleh Ditjen Pothan Kemhan.

Berdasarkan data peserta kegiatan Bimnis Bela Negara pada 2011, sebanyak 123 orang terdiri dari para Danramil dan Babinsa di jajaran Kodim 1202 Singkawang, anggota Polres Kabupaten Sambas, aparat Pemkab Sambas, serta Pramuka dan para pemuda di Kabupaten Sambas. Informasi yang diperoleh dari narasumber, baik melalui angket maupun wawancara, diharapkan dapat memberikan data terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/Bimnis PKBN yang telah dilaksanakan. Data tersebut juga mencakup kelemahan dan kekurangan yang ditemui, kemampuan dan kesiapan pemapar dan peserta, serta dampak dari pelaksanaan sosialisasi/Bimnis tersebut bagi para peserta.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang jelas dan rinci terkait permasalahan penelitian dan fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan demikian, diharapkan dapat dibangun sebuah konstruksi yang nantinya dapat digunakan sebagai model dan/atau bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Kekuatan metode ini terletak pada teori dan referensi yang digunakan untuk menguji asumsi-asumsi yang dipakai dalam penelitian. Dalam hal ini, persepsi yang terbangun tidak mutlak pada

peneliti, tetapi lebih pada responden/narasumber/informan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan wawancara kepada responden yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Kuesioner didesain sedemikian rupa untuk dapat menggambarkan persepsi responden terhadap kelebihan dan kekurangan dari pemateri kegiatan sosialisasi/Bimnis PKBN Kemhan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan manfaat serta dampak kegiatan tersebut bagi para peserta. Berdasarkan alasan tersebut, maka responden yang dapat mengisi kuesioner hanya mereka yang sudah pernah mengikuti (menjadi peserta) kegiatan sosialisasi/Bimnis PKBN yang dilaksanakan Kemhan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, dokumen, dan laporan penelitian.

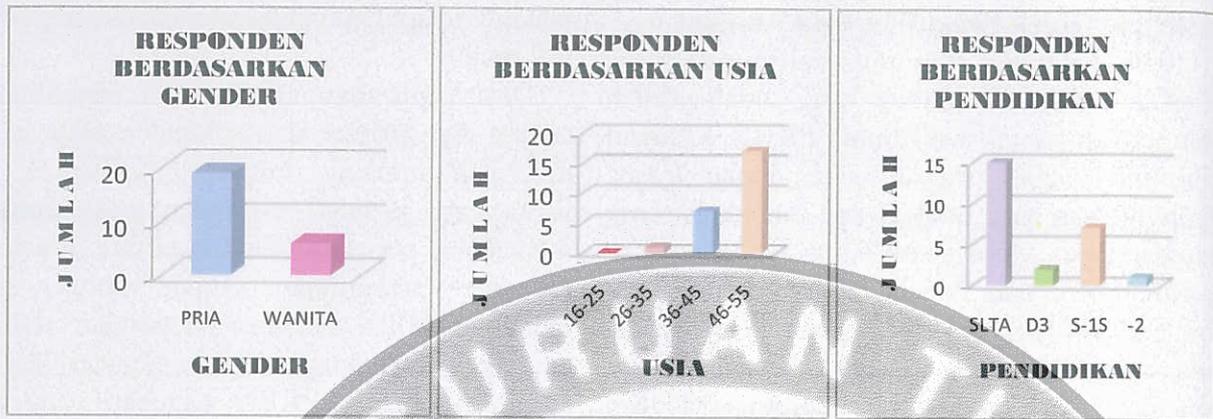
Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskripsi analitis. Idealnya, penelitian ini menggunakan model analisis sistem dinamik (*dynamic system*), namun sampai akhir kegiatan pengumpulan data (khususnya data terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program PKBN yang telah dilaksanakan Kemhan), data yang diharapkan tidak berhasil diperoleh tim. Sebagai alternatif, efektivitas program PKBN Kemhan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk disilangkan dengan peluang dan ancaman dalam rangka mewujudkan efektivitas program PKBN Kemhan. Hasil analisisnya kemudian diarahkan pada perumusan kebijakan dan penyusunan program PKBN yang lebih baik dan efektif di masa mendatang.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Selama pengumpulan data dijumpai 25 orang responden yang seluruhnya adalah mantan peserta Bimnis Bela Negara Kemhan di Kabupaten Sambas pada September 2011. Karakteristik kedua puluh lima orang responden ini dipaparkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan latar belakang pendidikan (Gambar 2).



Gambar 2. Karakteristik responden.

2. Analisis terhadap Kondisi Wilayah dan Tingkat Kesadaran Bela Negara di Daerah Rawan Konflik dan Perbatasan

Dari hasil pengumpulan data di lokus penelitian, diperoleh data dan fakta terkait kondisi terkini daerah dan masyarakat setempat, tingkat kesadaran bela negara masyarakat, serta efektivitas program dan kegiatan bela negara yang diselenggarakan Kemhan maupun Pemda dan Korem atau Kodim setempat.

Realitas di daerah perbatasan menunjukkan bahwa masyarakat setempat merasa perhatian pemerintah terhadap pembangunan wilayah

mereka selama ini kurang memadai. Minimnya infrastruktur dan prasarana jalan raya yang buruk menyulitkan masyarakat setempat dalam menjual hasil tani dan kebunnya, serta dalam distribusi kebutuhan bahan pokok. Bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, membeli sembako dan produk dari Malaysia merupakan pilihan terbaik. Masyarakat setempat juga lebih familier dengan siaran-siaran dan frekuensi radio dari Malaysia dibandingkan siaran televisi nasional. Kondisi tersebut membuat kedaulatan negara dan nasionalisme masyarakat setempat rawan.



Sumber: Kompas, Senin 17 Nopember 2014 hal. 21

Gambar 3. Permasalahan warga perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kondisi di atas juga diakui oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jaffar, yang menjelaskan bahwa selama ini desa di perbatasan kurang tersentuh pembangunan, sehingga kondisi

SDM dan infrastrukturnya masih sangat memprihatinkan. Desa di daerah perbatasan mengalami tiga persoalan pokok, yakni ketertinggalan, kemiskinan, dan minimnya perhatian dari pemerintah. Kondisi jalan di

desa perbatasan sangat buruk, sehingga barang-barang kebutuhan pokok susah didapat. Sinyal telepon genggam juga jelek, sehingga komunikasi dengan wilayah lain susah dilakukan. Kondisi semacam ini kadang membuat masyarakat perbatasan lebih bergantung pada pasokan barang kebutuhan sehari-hari dari Malaysia. Masyarakat perbatasan masih merasa bagian dari NKRI, tetapi negara tetangga menjanjikan kehidupan yang lebih baik (*Kompas*, 17 November 2014).

Kondisi serupa, bahkan lebih kompleks, juga ditemukan di wilayah perbatasan Papua. Tekstur dan topografi wilayah yang didominasi pegunungan mempersulit pembangunan infrastruktur, khususnya jalan raya. Desa-desa di perbatasan umumnya hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara. Satu hal penting yang harus diperhatikan, bahwa pembangunan itu harus juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua, termasuk yang tinggal di pedalaman dan pegunungan. Pembangunan juga harus difokuskan pada pembangunan SDM Papua agar pembangunan wilayah dan masyarakatnya bisa berlangsung cepat dan sejalan dengan nilai-nilai adat setempat serta sesuai dengan keinginan rakyat Papua dalam bingkai NKRI.

Banyak kebijakan pemerintah yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan adat dan kearifan lokal. Masyarakat asli dan masyarakat adat selama ini kurang dilibatkan dalam proses kebijakan. Peran gereja yang terbukti mampu menjangkau dan diterima kalangan masyarakat pedalaman juga kurang diberdayakan oleh pemerintah. Konflik-konflik vertikal yang terjadi membuktikan bahwa masyarakat setempat kurang dapat menerima kebijakan pemerintah dan memandang pembangunan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Sebaliknya, pembangunan justru dianggap hanya alasan untuk menggusur masyarakat asli dari tanah leluhurnya.

Tingkat kesadaran bela negara masyarakat Jayapura dan Papua pada umumnya masih perlu ditingkatkan. Patriotisme kedaerahan masih lebih dominan dibandingkan dengan rasa nasionalisme. Penghargaan masyarakat Papua, khususnya generasi mudanya, terhadap simbol-simbol negara, hari besar nasional,

dan lagu-lagu nasional masih rendah. Kualitas SDM mereka umumnya masih rendah sehingga sulit untuk menerima adanya perbedaan dan perubahan zaman. Pendekatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk aparat keamanan, kurang optimal. Pemahaman dan pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat suku asli di pedalaman Papua kurang sesuai dengan kebiasaan masyarakat lokal.

Adapun di Kabupaten Sambas, pembangunan di desa-desa perbatasan belum diarahkan pada pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang menghubungkan sepanjang garis perbatasan dengan wilayah Serawak, Malaysia. Saat ini akses jalan ke Desa Temajuk memang sudah terbuka, namun dengan kondisi terbatas. Alokasi anggaran yang dimiliki Pemda lebih diarahkan pada pembangunan jalan ke arah dalam menuju Kota Sambas. Hal ini dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat. Padahal infrastruktur jalan yang menghubungkan garis perbatasan memiliki arti strategis dari perspektif pertahanan negara. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat untuk menyinkronkan program-program di sejumlah kementerian dan lembaga guna mewujudkan program pembangunan wilayah perbatasan yang terintegrasi. Pembangunan infrastruktur sepanjang garis perbatasan dan sentra-sentra ekonomi masyarakat di desa-desa tertinggal di sekitar perbatasan harus diupayakan berjalan bersamaan (kolaborasi pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan).

Kesadaran bela negara masyarakat di Kabupaten Singkawang dan Sambas menunjukkan kecenderungan menurun, khususnya di kalangan generasi muda. Penghargaan masyarakat terhadap bendera, simbol-simbol negara, dan lagu-lagu wajib cenderung semakin rendah. Upacara bendera dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional hanya dilaksanakan oleh aparat dan sekolah-sekolah. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan Bimnis bela negara pada masa mendatang sebaiknya dilakukan di desa-desa di perbatasan dan lebih diarahkan pada para pelajar dan generasi muda.

Sembako, makanan, dan minuman kemasan, serta produk-produk lain dari Malaysia banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional dan minimarket di Singkawang dan Sambas. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah harus berupaya untuk menjamin kelancaran distribusi barang produk dalam negeri dan membatasi masuknya barang dari Malaysia

Pembangunan karakter, khususnya bagi generasi muda, di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan juga menjadi prioritas pembangunan pemerintah. Gejala semakin banyaknya pemuda yang suka mabuk-mabukan dan kebut-kebutan di kedua wilayah tersebut menunjukkan telah terjadinya pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Tokoh masyarakat setempat menyatakan bahwa generasi muda saat ini merasa sosok yang dapat dijadikan panutan dan teladan semakin sulit ditemukan, baik di rumah maupun lingkungan sekitar. Para tokoh tersebut mengharapkan pemerintah dapat membuat dan menerapkan program dan kegiatan yang fokus pada pembentukan karakter dan pembangunan moral dengan menyin-kronkan program di sekolah dan luar sekolah dengan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman. Metode dan pendekatan yang selama ini dilaksanakan memang lebih bersifat indoktrinasi dan sudah tidak lagi dapat diterima kalangan generasi muda. Pendekatan yang trendi, partisipatif, komunikatif, dan implementatif menjadi pilihan terbaik.

3. Analisis terhadap Efektivitas dan Faktor Penghambat Kegiatan Sosialisasi/Bimnis PKBN Kemhan

Riset untuk mengetahui efektivitas suatu program atau kegiatan sangat kompleks, apalagi jika riset tersebut harus sampai pada tahapan menetapkan apakah program atau kegiatan tersebut efektif atau tidak efektif. Demikian halnya dengan litbang efektivitas program PKBN Kemhan ini. Pada tataran ideal, seharusnya riset ini pada akhirnya mampu menyatakan apakah program tersebut efektif atau tidak, dan bahkan hasil akhir riset ini nantinya dapat dijadikan model. Namun, banyak keterbatasan harus dihadapi oleh tim,

khususnya terkait kurangnya data mengenai daftar peserta kegiatan sosialisasi ataupun Bimnis bela negara yang telah dilaksanakan Ditjen Potan Kemhan periode 2007 s.d. 2013. Riset tahun ini lebih kepada analisis persepsi responden/narasumber terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi/Bimnis PKBN Kemhan selama ini. Persepsi tersebut, sebagaimana tertuang pada angket sesuai dimensi dan indikator yang sudah dirumuskan, meliputi persepsi tentang puas/tidak puasnya responden terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi/Bimnis, baik dari segi tempat, waktu, materi, kualitas pemapar/pengajar, maupun manfaat atau dampak sosialisasi/Bimnis bagi responden. Namun demikian, tim tetap berupaya menggambarkan kondisi nyata saat ini melalui analisis SWOT untuk menjelaskan dan merumuskan strategi apa yang paling mungkin untuk dilakukan berdasarkan realitas yang ada saat ini.

Sebagaimana lazimnya riset efektivitas/evaluasi, gambaran detail setiap tahapan program/kegiatan harus dibuat jelas, semua faktor yang dapat menjadi penghambat dianalisis, dan setiap tahapan atau sistem/subsistem yang menyertai program/kegiatan dianalisis sebagai satu kesatuan, sehingga menjadi semacam siklus. Hal ini karena jika ditemukan adanya faktor penghambat, maka umpan balik (*feedback*) harus dilakukan.

Program dikatakan efektif, dan evaluasi dinyatakan lengkap, apabila telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sebelum membuat *judgment*, evaluator menentukan masing-masing standar terlebih dahulu. Masing-masing standar diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Ada dua tipe standar, yaitu standar relatif dan standar absolut. Standar relatif merupakan standar alternatif sebuah program yang dianggap dapat memuaskan, sementara standar absolut adalah standar mutlak yang harus ada dalam sebuah program (Stufflebeam, 1985 : 222). Standar merupakan *benchmarks* kinerja program atau kriteria yang menjadi pembanding untuk memutuskan program telah sukses atau gagal.

Judgment diambil dengan cara membandingkan kesenjangan hasil observasi dengan tujuan yang diharapkan dan standar absolut

yang telah ditetapkan oleh peneliti atau standar relatif pada program lain. Program dapat dinyatakan lebih baik dari program lain apabila hasil observasi lebih baik dari standar yang ditetapkan. Penggabungan *judgment* relatif dan absolut dapat dilakukan untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Hasil analisis kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dan kenyataan yang diobservasi kemudian dibandingkan dengan standar kualitas. Standar dapat ditetapkan pada saat merumuskan tujuan dan indikator keberhasilan.

Kekurangan atau kelemahan dalam riset ini adalah tidak tersedianya data yang lengkap tentang detail perencanaan program, serta detail pelaksanaan program (waktu, tempat, materi sosialisasi, daftar peserta) dan monitoring (hasil dan dampak sosialisasi/Bimnis bagi peserta yang sudah mengikuti kegiatan tersebut). Beberapa poin penting yang didapatkan dari riset ini berdasarkan masukan data responden melalui angket dan hasil diskusi dengan *stakeholders* di empat lokus adalah sebagai berikut:

- a. Sebanyak 60% responden menyatakan puas dengan kemampuan pemapar/pengajar.
- b. Sebanyak 84% responden menyatakan puas dan setuju bahwa pemapar/pengajar telah memanfaatkan penggunaan suara latar dan musik dalam pemaparan materi sosialisasi/Bimnis.
- c. Penting bagi pemapar/pengajar untuk memaksimalkan penggunaan permainan (*games*) dalam menjelaskan esensi materi sosialisasi. Hasil angket menunjukkan, 88% responden setuju dengan pernyataan bahwa perlu memakai pendekatan permainan yang baik dalam menjelaskan permasalahan terkait bela negara pada saat sosialisasi/Bimnis dilaksanakan.
- d. Sebanyak 80% responden yang menyatakan puas dengan kegiatan sosialisasi/ Bimnis bela negara.
- e. Hasil diskusi dengan para *stakeholders* di Korem/Kodim, Kesbangpol, dan kampus di empat lokus dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Secara umum kesadaran bela negara masyarakat di daerah rawan konflik dan perbatasan (Jayapura/Papua, Singkawang dan Sambas, Tarakan dan Nunukan, Palu dan Poso) cenderung menurun, khususnya di kalangan generasi muda. Sengketa tanah menjadi salah satu persoalan pokok terutama di Papua, Tarakan, dan Nunukan.
- 2) Adanya perbedaan sering kali dijadikan pemicu perpecahan dan sumber konflik. Hal ini sangat berbeda dengan makna kebhinekaan yang selama ini dipahami sebagai modal bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Kepemimpinan nasional yang lemah menyebabkan pembangunan nasional dan pembangunan karakter bangsa tidak lagi diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya masyarakat Indonesia yang berkarakter unggul dan toleran terhadap perbedaan.
- 4) Lemahnya penegakan hukum dan minimnya penghargaan nilai-nilai luhur Pancasila menyebabkan kebenaran akan nilai dan moral semakin sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
- 5) Menumbuhkembangkan kesadaran bela negara masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan yang didasari kejujuran, keteladanan, dialog, dan penghargaan terhadap kearifan lokal.

Dari uraian di atas terlihat bahwa program PKBN yang dilaksanakan Kemhan selama ini masih memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki di masa mendatang. Beberapa hal penting yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program tersebut antara lain:

- a. Materi, modul, dan metode untuk kegiatan sosialisasi maupun Bimnis bela negara harus dibuat sedemikian rupa agar lebih menarik dengan mengoptimalkan penggunaan audio visual yang atraktif.

Pelaksanaannya diharapkan menggunakan metode interaktif dan partisipatif, serta dalam penyampaiannya disesuaikan dengan karakteristik peserta dan memuat nilai-nilai kearifan lokal.

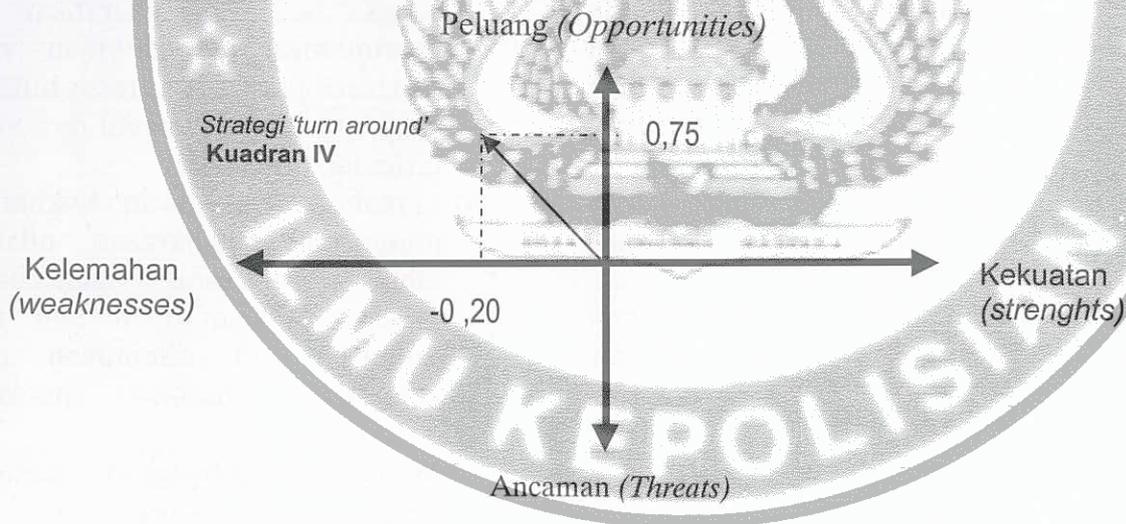
- b. Pengajar/ pemapar harus memiliki kemampuan yang memadai, penampilan yang menarik, dan pemahaman yang baik terhadap kebiasaan, adat setempat, dan nilai-nilai kearifan lokal. Pengajar/pemapar juga perlu mengoptimalkan penggunaan audio visual yang menarik, serta contoh-contoh yang dapat menggugah kesadaran peserta.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan Bimnis bela negara sebaiknya disertai survei kepada peserta melalui angket pada awal dan akhir kegiatan. Hal ini untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran bela negara serta tingkat

kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

- d. Kemhan perlu mengintensifkan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan konsep, metode, dan modul yang tepat dan efektif, sehingga manfaat, sasaran, dan efektivitas kegiatan dapat dicapai.

4. Strategi Program PKBN Kemhan di Daerah Rawan Konflik dan Perbatasan yang Efektif

Dari hasil analisis SWOT, tergambar bahwa posisi pelaksanaan program PKBN Kemhan saat ini berada pada kuadran IV. Hasil tersebut menggambarkan strategi "turn around", yakni meminimalkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan merebut peluang/kesempatan yang ada dalam rangka pelaksanaan program PKBN Kemhan di daerah rawan konflik dan perbatasan yang efektif dan efisien.



Gambar 4. Posisi strategi pelaksanaan program PKBN Kemhan di daerah rawan konflik dan perbatasan saat ini.

Adapun langkah untuk mencapai strategi tersebut pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi dan memantapkan perencanaan program dan/atau kegiatan PKBN Kemhan yang lebih terukur, sehingga *output* dan *outcome* yang dihasilkan lebih valid dan memiliki nilai tambah.
- b. Meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah terkait serta kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka

penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan bela negara di daerah rawan konflik dan perbatasan, khususnya di desa-desa perbatasan.

- c. Memantapkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan PKBN.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terukur dan berkala terhadap program dan/atau kegiatan bela negara yang telah dilaksanakan.
- e. Mempersiapkan modul, bahan, dan

materi pengajaran yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini, serta mempertimbangkan implementasi nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang sesuai karakteristik masing-masing daerah. Selain itu, penggunaan modul dan metode sosialisasi, Bimnis, dan kegiatan lainnya harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta. Modul dan metode untuk murid SD, sekolah menengah, mahasiswa, aparatur, dan masyarakat harus berbeda satu sama lain.

- f. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan merumuskan metode-metode sosialisasi/ Bimnis bela negara yang disesuaikan dengan tren, karakteristik peserta, dan dinamika perkembangan.
- g. Kemhan dan Kemendikbud bersinergi dalam menggiatkan dan melaksanakan pelatihan para kader bela negara dari kalangan guru dan dosen.
- h. Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan, transportasi, dan sentra-sentra ekonomi) di daerah perbatasan, meningkatkan kualitas SDM setempat, menjamin kelancaran distribusi sembako dan aliran barang dari dalam negeri, serta membatasi masuknya barang dari negara tetangga.
- i. Mendesak pemerintah cq Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi/ Bimnis bela negara dan pembangunan karakter bangsa melalui kebijakan yang mewajibkan setiap media elektronik nasional mengalokasikan jam siarannya untuk tayangan terkait bela negara dan pembangunan karakter bangsa.

5. Pembahasan Hasil Penelitian

Riset efektivitas program PKBN Kemhan di daerah rawan konflik dan perbatasan pada tahun anggaran 2015 **belum dapat menghasilkan sebuah model untuk mengukur efektivitas program atau kegiatan.** Riset ini baru pada tahap analisis persepsi tentang tingkat kepuasan responden terhadap pelaksanaan sosialisasi/Bimnis PKBN Kemhan yang sudah pernah dilaksanakan, kemampuan

pemapar/pengajar dan peserta sosialisasi, penghimpunan data tingkat kesadaran bela negara masyarakat, kondisi terkini wilayah, dan permasalahan yang menonjol dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi nilai-nilai bela negara di lokus penelitian. Artinya, riset ini belum masuk ke tahap *judgement* untuk menyatakan apakah program PKBN Kemhan yang diselenggarakan selama ini sudah efektif, kurang efektif, atau belum efektif sama sekali.

Hasil analisis data angket pemapar/pengajar dan peserta dari 25 orang responden di Kabupaten Sambas secara umum menunjukkan gambaran persepsi responden bahwa responden relatif puas dengan kegiatan sosialisasi/Bimnis PKBN yang dilaksanakan oleh Kemhan selama ini. Namun demikian, para responden juga sangat mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan, antara lain pada metode pelaksanaan yang sebaiknya lebih dialogis, interaktif, dan partisipatif. Pengajar/pemapar dinilai masih kurang mengoptimalkan penggunaan gambar, suara latar, dan lagu untuk menjelaskan substansi, serta masih kurang menerapkan penggunaan model permainan (*games*) yang atraktif, edukatif, dan partisipatif.

Adapun dari diskusi yang dilaksanakan selama penelitian dengan para pemangku kepentingan terlihat bahwa terjadi kecenderungan menurunnya kesadaran bela negara masyarakat, baik di daerah rawan konflik maupun daerah perbatasan, khususnya di kalangan generasi muda. Kecenderungan yang terlihat bahwa masyarakat semakin tidak peduli dengan hari-hari besar nasional, seperti perayaan kemerdekaan. Demikian halnya dengan para generasi muda, khususnya para pelajar dan mahasiswa, yang tidak lagi akrab dan tidak hafal dengan lagu-lagu wajib, serta memiliki penghargaan yang kurang terhadap lambang-lambang negara dan kurang menyukai produk Indonesia. Fenomena-fenomena tersebut merupakan gejala awal semakin lunturnya nilai-nilai bela negara di kalangan generasi muda. Hal ini mengindikasikan alarm bahaya bagi eksistensi bangsa yang kita cintai ini. Sudah waktunya melakukan terobosan-

terobosan yang komprehensif dan harus menjadi gerakan nasional untuk membangun karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai bela negara yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pendiri bangsa.

Pembangunan wilayah perbatasan dan masyarakatnya harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Ego sektoral harus diminimalkan dengan memantapkan koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat. Koordinasi dan sinergi tersebut meliputi lingkup program yang harus saling dukung dan terpadu, tidak tumpang tindih. Selain itu, alokasi anggaran yang melekat dalam program masing-masing kementerian dan lembaga juga harus efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga hasil program (*outputs*) dan dampaknya (*outcomes*) bermanfaat bagi kemajuan wilayah perbatasan dan perkembangan masyarakat setempat.

Stephen B. Jones dalam Sutisna merumuskan teori berkaitan dengan pengelolaan perbatasan yang membagi ruang lingkup pengelolaan ke dalam empat bagian, yaitu alokasi (*allocation*), delimitasi (*delimitation*), demarkasi (*demarcation*), dan administrasi (*administration*). Dalam perkembangannya, lingkup administrasi telah bergeser ke arah pengelolaan perbatasan atau manajemen perbatasan. Apabila diselaraskan dengan teori yang dikemukakan oleh Jones, hasil dari berbagai studi tentang kawasan perbatasan pada umumnya mengidentifikasi tiga isu utama masalah pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia, yakni (1) masalah yang berkenaan dengan penetapan garis batas (alokasi, delimitasi, dan demarkasi), baik darat (demarkasi) maupun laut (delimitasi), (2) masalah pengamanan kawasan perbatasan, dan (3) masalah pengembangan kawasan perbatasan (administrasi). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan perubahan paradigma pengelolaan perbatasan. Hal itu dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang pemerintah terhadap kawasan perbatasan, yang semula berorientasi ke dalam (*inward looking*) menjadi berorientasi ke luar (*outward looking*). UU

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menegaskan pergeseran orientasi pengembangan wilayah perbatasan dari *inward looking* menjadi *outward looking* sebagai pintu gerbang ekonomi dan perdagangan, termasuk di dalamnya pendekatan kesejahteraan untuk pulau di wilayah perbatasan. Pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan yang berorientasi pada aspek kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) telah dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga dan instansi, tetapi masih bersifat parsial dan belum menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan perbatasan yang utuh dan terintegrasi (Moeldoko, 2011: 4-5).

Banyaknya kementerian/lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perbatasan terlihat dari jumlah kementerian/lembaga yang mencapai 26 kementerian/lembaga dengan 72 program di tingkat satuan kerja (satker) Eselon 1. Kompleksitas permasalahan perbatasan terlihat dari beragamnya dimensi permasalahan pengelolaan perbatasan, baik imaterial maupun material. Pada aspek kelembagaan, lembaga pengelolaan perbatasan Indonesia masih ditangani secara parsial oleh berbagai komite perbatasan yang bersifat *ad hoc* dan oleh instansi pusat terkait secara sektoral. Lembaga atau institusi yang mempunyai otoritas untuk mengelola kawasan perbatasan masih tumpang-tindih. Selain itu, belum terasa adanya koordinasi yang memadai di antara instansi-instansi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Lembaga yang memiliki otoritas ternyata terpecah-pecah di berbagai induk institusi, sehingga menyulitkan pengimplementasian sebuah kebijakan yang memusat.

Pembangunan daerah perbatasan dan masyarakatnya juga perlu memperhatikan keinginan masyarakat di wilayah perbatasan, adat, dan kearifan lokal, serta melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam proses pembangunan. Dengan demikian, masyarakat setempat tidak merasa hanya sebagai objek

pembangunan di tanah leluhurnya. Sengketa lahan antara masyarakat dengan pemerintah setempat yang banyak terjadi di Papua, Tarakan, dan Nunukan, seperti kasus tanah adat yang termasuk dalam *masterplan* pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, perlu segera diselesaikan. Penegakan hukum harus mengedepankan implementasi hukum nasional yang dapat sejalan dengan hukum adat, sehingga hukum adat dapat harus tunduk kepada hukum nasional. Untuk mendapat titik temu dari perbedaan tersebut, diperlukan pendekatan kepada masyarakat adat dan tokoh masyarakat setempat, sehingga program pembangunan di wilayah bersangkutan tidak terhambat.

Masyarakat sangat mengharapkan adanya perubahan paradigma, di mana penyelenggara negara sesungguhnya abdi negara dan abdi masyarakat. Pengabdian mereka harus diarahkan bagi terwujudnya kesejahteraan umum (masyarakat) sesuai dengan amanah konstitusi. Keteladanan para pemimpin sangat penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini didasari realitas bahwa pada umumnya budaya Indonesia menganut patron "patrilineal", sehingga sikap dan perilaku seorang pemimpin akan ditiru oleh anggotanya.

Program PKBN Kemhan di masa mendatang diharapkan menjadi program yang generik. Artinya, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah rawan konflik dan perbatasan, lebih efektif jika dilaksanakan oleh Pemda setempat secara struktural dari tingkat provinsi sampai tingkat desa. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud antara lain pembinaan dan pendampingan secara aktif kepada masyarakat agar kehidupannya lebih sejahtera, pembauran dan hubungan antarkelompok masyarakat lebih harmonis, memiliki toleransi dan empati terhadap sesama, tetap terpeliharanya nilai-nilai luhur adat setempat dan kearifan lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya masyarakat perbatasan dan wilayah rawan konflik, memiliki tujuan dan makna strategis. Dengan adanya pemberdayaan, dengan sendirinya masyarakat setempat merasakan peran penting mereka bagi kemajuan daerahnya. Hal ini juga bermakna

bahwa masyarakat lokal adalah agen perubahan yang sesungguhnya bagi perkembangan dan kemajuan wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik.

Selama ini kurangnya perhatian pemerintah pada wilayah perbatasan mendorong loyalitas masyarakat perbatasan pada beberapa kasus menurun, meskipun lebih kepada faktor kekecewaan struktural. Selama ini, dari segi kebijakan, pemerintah menggunakan dua pendekatan untuk mewujudkan bela negara di wilayah perbatasan, yaitu diarahkan ke luar negeri dan di dalam negeri. Pendekatan jalur diplomasi sebagai instrumen politik luar negeri dilakukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional dengan pihak negara lain. Diplomasi ini tentunya harus didukung oleh kekuatan nasional yang tangguh, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Adapun pendekatan ke dalam negeri dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, yakni dengan menghadirkan pembangunan, terutama infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan prasarana lainnya.

Nilai-nilai bela negara diharapkan menjadi sebuah kesepakatan untuk menjadi landasan sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga menjadi kesadaran baik pada tataran individu (personal), tataran komunitas (masyarakat), sampai pada tataran bangsa (Kementerian Pertahanan, 2010: 8).

Di tataran individu (personal), nilai dalam kehidupan perlu diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Oleh karena itu, individu harus mampu melakukan internalisasi. Setiap individu dituntut untuk mematuhi nilai-nilai yang berlaku yang dikemas dalam norma yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Di tataran komunitas (masyarakat), masyarakat bukan semata-mata kumpulan berbagai individu, tetapi juga suatu komunitas yang secara integral memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, individu-individu dituntut untuk bersama-sama menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai ini, jika dihayati dan dilaksanakan bersama, akan melahirkan keinginan untuk tetap bersatu,

karena adanya *social cohesiveness*. Di tataran bangsa (*nation*), bahwa dalam masyarakat sebenarnya terjadi sejenis perjanjian (*social contract*), berupa perasaan kebersamaan dalam mendukung nilai-nilai luhur yang ada. Perasaan kebersamaan tersebut tidak terbatas hanya pada tataran masyarakat atau komunitas saja, tetapi lebih luas lagi pada tataran bangsa.

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi strategi pelaksanaan program PKBN Kemhan dan kondisi kesadaran bela negara masyarakat saat ini berada di kuadran IV. Dengan demikian, strategi yang paling mungkin untuk dilaksanakan saat ini adalah strategi “*turn around*”. Strategi tersebut mengisyaratkan bahwa kita harus berupaya meminimalkan kelemahan-kelemahan yang kita miliki dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, untuk merebut peluang/kesempatan yang potensial. Jargon “*revolusi mental*” yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan saat ini sejalan dengan nilai-nilai kesadaran bela negara. Implementasi nilai-nilai bela negara yang pada hakikatnya adalah pembangunan karakter bangsa yang tangguh, toleran terhadap perbedaan, dan menghargai nilai-nilai luhur Pancasila, menjadi sangat penting. Terlebih dihadapkan pada semakin besarnya tantangan yang kita hadapi di era globalisasi dan pasar global. Kedaulatan sebuah negara seakan semakin abstrak di era global saat ini. Keberadaan sebuah negara bangsa akan semakin terancam jika tidak didukung dengan karakter yang kuat dan jati diri bangsa yang tangguh.

Peningkatan kesadaran bela negara menjadi sebuah keharusan jika melihat kondisi faktual bangsa saat ini. Nilai-nilai bela negara tersebut harus terimplementasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan selama ini perlu dievaluasi, mengingat perkembangan zaman dan kondisi psikologis masyarakat yang semakin kehilangan kepercayaan kepada aparat pemerintah. Masyarakat harus ditempatkan di garda terdepan dalam Pendidikan Kesadaran Bela Negara. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek dan bukan objek pembangunan. Keteladanan dan penegakan hukum menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan dalam

merebut kembali “hati rakyat” dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara.

KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan masih memprihatinkan. Kesadaran bela negara masyarakat di daerah rawan konflik dan perbatasan cenderung menurun, khususnya di kalangan generasi muda. Sikap dan perilaku generasi muda (pelajar, mahasiswa, dan remaja/pemuda) menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai bela negara dan mudah terprovokasi, sehingga terlibat dalam tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, seperti perkelahian dan tindakan melanggar hukum. Program dan kegiatan sosialisasi/Bimnis bela negara yang dilaksanakan oleh sejumlah kementerian dan lembaga belum diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi, baik dalam hal metode, modul, maupun sasaran program/kegiatan tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga masih berorientasi proyek dan memunculkan ego sektoral.

Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah rawan konflik dan perbatasan, harus menempatkan Pemda setempat dari jajaran Pemprov sampai dengan desa sebagai penjurur. Program tersebut memiliki arti strategis dan lebih efektif bagi percepatan perkembangan wilayah dan masyarakat setempat. Dengan partisipasi aktif masyarakat lokal, masyarakat akan merasa bahwa mereka merupakan pelaku (subjek) pembangunan sekaligus agen perubahan di wilayahnya sendiri. Demikian juga dengan program PKBN Kemhan di masa mendatang. Program ini harus menjadi program yang generik. Program dan kegiatan sosialisasi/Bimnis bela negara harus menjadi prioritas Pemda setempat, bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dan lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buchori, M. (2007). Mengembangkan pendidikan bermakna di Indonesia: apa tanggung jawab setiap *stakeholders*?" dalam *Refleksi tentang pendidikan bermakna menuju Indonesia baru*. Jakarta: Yayasan bhumiaksara.
2. Departemen Pertahanan RI. (2008). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Jakarta: Dephan RI.
3. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. (2010). *Pendidikan kesadaran bela negara (pedoman bagi dosen pendidikan kewarganegaraan)*.
4. Madaus, G. F., & Stufflebeam, D. L. (eds). (1985). *Systematic evaluation, evaluation in education and human services*. Massachusetts: Chestnut Hill.
5. Madaus, G. E., Scriven, M. S., & Stufflebeam, D. L. (1986). *Evaluation model, viewpoint on educational and human service evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
6. Moeldoko. (2011). Kompleksitas pengelolaan perbatasan: tinjauan dari perspektif kebijakan pengelolaan perbatasan Indonesia. idu.ac.id/index.
7. Morecroft, J. D. W. & Sterman, J. D. (eds). (1994). *Modeling for learning organizations, system dynamic series*. Portland, Oregon: Productivity Press.
8. Neill, J. (2006). *Meta-analysis research methodology*. <http://www.wilderdom.com>.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
10. Universitas Pertahanan Indonesia. (2013). Laporan hasil riset pelaksanaan bela negara di daerah konflik Poso, D-LPPM nomor 001. Jakarta: Unhan.
11. Universitas Pertahanan Indonesia. (2013). Laporan hasil riset pelaksanaan bela negara di daerah konflik Papua, D-LPPM nomor 002. Jakarta: Unhan.
12. Yonatan, W. & Prawoto. (2013). *Manifestasi Pancasila: dalam pasang surut stabilitas dan partisipasi politik di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
13. Yudhohusodo, S. (1996). *Semangat baru nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pembangunan Bangsa.

